

DIPLOMASI ILMIAH DAN KONSENSUS KEAGAMAAN: STUDI ADMINISTRASI PUBLIK KONGRES KALENDER HIJRIAH INTERNASIONAL ISTANBUL 2016

Muhammad Arafat

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 23933005@students.uii.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the 2016 International Hijri Calendar Unity Congress in Istanbul as a case study of scientific diplomacy and transnational public administration. The study is motivated by socio-religious fragmentation in the Muslim world due to the absence of a unified Hijri calendar. Initiated by the Presidency of Religious Affairs of Turkey, the congress functioned not only as an astronomical forum but also as a political strategy to reinforce Turkey's leadership within the Islamic world. Using the framework of scientific diplomacy and public administration theory, this qualitative research explores how scientific discourse was used to build religious consensus and advance foreign policy objectives. The findings reveal that the congress transformed prolonged debates into a concrete policy decision through procedural innovation via a voting mechanism that produced the Single Global Hijri Calendar resolution. However, its implementation encountered political and institutional obstacles, including opposition from certain religious authorities. This study concludes that the congress represents a partial success, demonstrating Turkey's capacity for religion-based soft power while revealing the limits of technocratic consensus within the governance of the Muslim world.

Keywords: *Science Diplomacy, Public Administration, Istanbul Congress 2016*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis International Hijri Calendar Unity Congress 2016 di Istanbul sebagai studi kasus dalam diplomasi ilmiah dan administrasi publik transnasional. Latar belakang penelitian ini adalah fragmentasi sosial-keagamaan di dunia Islam akibat ketiadaan kalender Hijriah yang seragam. Kongres yang diinisiasi oleh Kepresidenan Urusan Agama Turki berfungsi tidak hanya sebagai forum astronomi, tetapi juga sebagai strategi politik untuk memperkuat posisi Turki dalam kepemimpinan dunia Islam. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka diplomasi ilmiah dan teori administrasi publik untuk mengidentifikasi bagaimana sains dimanfaatkan dalam membangun konsensus keagamaan serta mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kongres tersebut berhasil mengubah diskusi yang berkepanjangan menjadi keputusan konkret melalui inovasi prosedural berupa pemungutan suara yang menghasilkan resolusi Kalender Hijriah Global Tunggal. Meskipun demikian,

penerapannya menghadapi hambatan politik dan kelembagaan, termasuk penolakan dari otoritas keagamaan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kongres tersebut merupakan keberhasilan parsial yang menegaskan kapasitas Turki dalam membangun soft power berbasis agama sekaligus menunjukkan batasan konsensus teknokratis dalam tata kelola dunia Islam.

Kata Kunci: *Diplomasi Ilmiah, Administrasi Publik, Kongres Istanbul 2016.*

PENDAHULUAN

Selama lebih dari empat belas abad, dunia Islam menghadapi sebuah paradoks peradaban: ketiadaan sistem kalender Hijriah tunggal yang bersifat unifikatif, prediktif, dan otoritatif. Kegagalan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi sebuah "utang peradaban" yang tertunda terlalu lama, sebuah anomali dalam konteks dunia modern yang menuntut kepastian dan presisi waktu. Ketidakteraturan ini telah menimbulkan dampak yang luas dan mendalam, melintasi batas-batas ritual keagamaan hingga ke ranah administrasi publik dan stabilitas sosial-ekonomi (Mohd Nawawi et al., 2024).

Secara administratif dan ekonomi, disunifikasi kalender menciptakan kesulitan nyata dalam perencanaan pemerintahan, penetapan hari libur nasional, dan interaksi sosial-ekonomi lintas negara. Di sektor keuangan syariah, ketidakpastian tanggal memengaruhi akurasi perhitungan haul zakat dan administrasi wakaf, yang berpotensi mengurangi optimalisasi kesejahteraan sosial umat. Lebih jauh lagi, dalam ranah ibadah yang menjadi inti persoalan, perbedaan dalam memulai dan mengakhiri bulan puasa Ramadan, serta perayaan Idulfitri dan

Iduladha, secara rutin terjadi tidak hanya antarnegara, tetapi bahkan di dalam satu kota yang sama. Fenomena ini secara berulang memicu kebingungan publik, polemik, dan berpotensi merenggangkan ikatan persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) (Fitriyanti et al., 2024).

Di tengah kebuntuan historis ini, *International Hijri Calendar Unity Congress* yang diselenggarakan di Istanbul pada Mei 2016 harus dipahami dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Kongres ini bukanlah sebuah inisiatif yang muncul tiba-tiba, melainkan manifestasi dari strategi kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang secara aktif memanfaatkan warisan sejarah Ottoman-Islam sebagai *instrumen soft power* untuk memproyeksikan pengaruhnya (Çiçek, 2024).

Aktor sentral dalam inisiatif ini adalah Kepresidenan Urusan Agama Turki (*Diyanet İşleri Başkanlığı* atau *Diyanet*). Lembaga ini telah mengalami transformasi signifikan dari sebuah badan yang mengurus urusan agama domestik menjadi aktor transnasional yang kuat dan berpengaruh, berfungsi sebagai instrumen utama diplomasi

keagamaan Turki di panggung global. Pemilihan isu kalender sebagai medium diplomasi merupakan sebuah langkah yang cerdas secara strategis. Isu ini memiliki tiga dimensi yang saling berkelindan: teknis (astronomi), religius (fiqh), dan politis (simbol persatuan dan otoritas). Dengan mengambil peran sebagai pemecah masalah, Turki memposisikan dirinya sebagai kekuatan yang tidak hanya peduli, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual dan politik untuk menyelesaikan salah satu problem peradaban paling pelik yang dihadapi umat Islam. Inisiatif ini memungkinkan Turki untuk memproyeksikan citra sebagai pemimpin yang modern dan rasional, sekaligus secara halus menantang pusat-pusat otoritas keagamaan tradisional yang selama ini berpusat di dunia Arab.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam konteks Kongres Kalender Islam Global di Istanbul tahun 2016, ketiga dimensi tersebut terlihat nyata. Dimensi *Science in Diplomacy* tampak melalui penggunaan data astronomi dan metode hisab sebagai dasar rasional untuk keputusan keagamaan. *Diplomacy for Science* muncul dalam upaya mempertemukan para ahli falak dan fuqaha dari berbagai negara. Adapun *Science for Diplomacy* menjadi dimensi yang paling menonjol, karena kolaborasi ilmiah dalam penentuan kalender digunakan sebagai sarana membangun solidaritas umat

Islam dan memperkuat posisi kepemimpinan Turki di dunia Islam.

Osborne dan Gaebler (1992) dalam karyanya *Reinventing Government* menjelaskan bahwa pemerintah idealnya berperan sebagai katalisator dan fasilitator yang berorientasi hasil. Dalam konteks ini, Kepresidenan Urusan Agama Turki (Diyamet) berperan aktif sebagai penggerak solusi terhadap persoalan kalender Hijriah yang gagal diselesaikan oleh lembaga multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam. Perspektif ini menunjukkan bahwa Turki menggunakan pendekatan manajemen pemerintahan modern dalam ranah keagamaan internasional (Osborne, David T Gaebler, 1992).

Habermas (1996) dalam *Between Facts and Norms* menjelaskan adanya ketegangan antara faktisitas (realitas sosial dan politik yang ada) dan validitas (klaim kebenaran yang diakui secara rasional). Dalam Kongres Istanbul, pertemuan antara fakta ilmiah (astronomi) dan kebenaran normatif (fiqh) mencerminkan dialektika antara dua dimensi tersebut. Proses deliberasi yang panjang akhirnya melahirkan kompromi administratif berupa mekanisme voting, yang menggantikan idealisme konsensus rasional dengan keputusan pragmatis. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam tata kelola global, ketika argumentasi rasional tidak mencapai titik temu, kekuasaan prosedural dapat menjadi

faktor penentu hasil akhir (Habermas, 1996).

Selain itu, akar perdebatan mengenai kalender Hijriah dapat ditelusuri melalui dua dikotomi utama dalam tradisi Islam. Pertama, dikotomi metodologis antara rukyat al-hilal (observasi langsung bulan sabit) dan hisab (perhitungan astronomis). Pendekatan rukyat menekankan ketaatan literal terhadap perintah untuk melihat hilal, sedangkan hisab menekankan kepastian ilmiah dan objektivitas. Upaya modern berusaha menggabungkan keduanya melalui konsep imkanur rukyat yang memanfaatkan perhitungan astronomi untuk memprediksi visibilitas hilal (Koto et al., 2024).

Kedua, dikotomi yurisdiksional antara *ittihad al-mathali'* (kesatuan matlak global) dan ikhtilaf al-mathali' (perbedaan matlak regional). Prinsip pertama menegaskan keserentakan awal bulan di seluruh dunia Islam, sedangkan prinsip kedua menekankan otonomi geografis dan otoritas lokal. Kongres Istanbul 2016 mengadopsi prinsip *ittihad al-mathali'* dengan metode hisab berbasis imkanur rukyat, yang menjadi inti resolusi Kalender Hijriah Global Tunggal (Nisa' & Ulinuha, 2021). Namun, pilihan ini juga menjadi sumber perdebatan karena bersinggungan dengan aspek politik, teologis, dan kedaulatan keagamaan di berbagai negara.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini memiliki

keterkaitan kuat dengan konsep tata kelola global dan diplomasi ilmiah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menyoroti aspek astronomis atau fikih, penelitian ini menawarkan analisis interdisipliner dengan menggunakan teori administrasi publik dan komunikasi deliberatif sebagai kerangka konseptual dalam memahami dinamika kebijakan global Kalender Hijriah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bersifat deskriptif-analitis (Baxter et al., 2008). Unit analisis utama adalah *International Hijri Calendar Unity Congress* yang diselenggarakan di Istanbul pada tahun 2016. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap sebuah fenomena kompleks dalam konteks dunia nyata.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi. Data primer dan sekunder dikumpulkan dan disintesis dari berbagai sumber, termasuk resolusi resmi kongres, laporan yang diterbitkan oleh Diyanet dan *International Union of Muslim Scholars* (IUMS), artikel dalam jurnal akademik yang mengkaji isu kalender Islam dan diplomasi Turki, laporan institusional dari organisasi seperti Muhammadiyah, serta analisis dari media massa internasional.

Analisis data dilakukan dengan menerapkan kerangka konseptual yang

telah diuraikan dalam kajian pustaka. Kerangka diplomasi ilmiah dari Royal Society dan teori-teori administrasi publik, termasuk konsep "*reinventing government*" dan teori diskursus Habermas, digunakan sebagai lensa analitis untuk menginterpretasikan data empiris yang terkumpul. Melalui proses ini, kongres tidak hanya dipandang sebagai peristiwa keagamaan atau astronomis, tetapi dianalisis sebagai sebuah fenomena kebijakan dan politik transnasional. Struktur dan format penyajian laporan ini disesuaikan dengan templat standar penulisan artikel ilmiah sebagaimana diidentifikasi dari dokumen acuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Aktor, Agenda, dan Proses Kongres

International Hijri Calendar Unity Congress diselenggarakan oleh Kepresidenan Urusan Agama Turki (Diyanet) pada tanggal 28 hingga 30 Mei 2016 di Istanbul (Başkanlığı, 2018).

Kongres ini dihadiri oleh para delegasi yang representatif dari sekitar 50 hingga 60 negara, yang terdiri dari para ulama, ahli fikih, astronom, perwakilan lembaga fatwa, kementerian urusan agama, institusi astronomi, dan organisasi masyarakat sipil Islam terkemuka. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh tiga

organisasi utama, yaitu Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penyelenggaraan kongres ini merupakan kulminasi dari proses agenda-setting yang panjang dan matang. Persiapan telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun di bawah arahan sebuah komite ilmiah khusus yang beranggotakan para ulama senior dan astronom. Komite ini telah mengadakan lima seminar persiapan untuk membahas berbagai aspek teknis dan fiqh sebelum kongres utama diselenggarakan.

Dalam persidangan Kongres Kalender Islam Global 2016 di Istanbul, perdebatan berpusat pada dua proposal utama yang diajukan untuk dipilih melalui mekanisme pemungutan suara (Scholars, 2016b).

Proposal pertama adalah Proyek Kalender Tunggal (*Mono Calendar*) yang mengusulkan satu sistem kalender unifikatif bagi seluruh dunia Islam. Prinsip yang digunakan adalah *ittihad al-mathali*, yaitu keserentakan awal bulan Hijriah secara global apabila kriteria visibilitas hilal telah terpenuhi di salah satu wilayah di muka bumi. Dengan sistem ini, seluruh umat Islam akan memulai bulan baru pada

hari yang sama di seluruh dunia. Sementara itu.

proposal kedua adalah Proyek Kalender Ganda (Duo Calendar) yang menawarkan pembagian dunia ke dalam dua zona yurisdiksi utama: Zona Timur yang mencakup Asia, Australia, Afrika, dan Eropa, serta Zona Barat yang meliputi Amerika Utara dan Selatan. Dalam model ini, awal bulan Hijriah berpotensi berbeda satu hari antara kedua zona, yang diperkirakan terjadi pada sekitar seperempat dari total bulan dalam setahun. Kedua proposal tersebut mencerminkan perbedaan pandangan antara keinginan untuk mencapai keserentakan global dan kebutuhan mempertahankan fleksibilitas lokal dalam penerapan kalender Islam.

b. Resolusi Kongres

Setelah melalui diskusi yang intensif dan perdebatan yang sengit, terutama mengenai isu yurisdiksi matlak yang tidak berhasil mencapai mufakat, penyelenggara memutuskan untuk mengambil keputusan melalui mekanisme pemungutan suara. Hasilnya, Proyek Kalender Tunggal memperoleh dukungan mayoritas yang signifikan, dengan perolehan sekitar dua pertiga suara (80 dari 127 suara sah), mengalahkan proposal Kalender Ganda (Scholars, 2016).

Dengan demikian, kongres secara resmi mengadopsi resolusi untuk menetapkan satu kalender Hijriah global yang kemudian dikenal di Indonesia sebagai Kalender Islam Global (KIG) Turki 2016. Resolusi ini memuat sejumlah kriteria teknis yang rinci untuk memastikan keseragaman penentuan awal bulan kamariah di seluruh dunia.

Prinsip utama dari resolusi tersebut adalah bahwa seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan (*ittihad al-mathali*'), sehingga awal bulan Hijriah dimulai secara serentak di seluruh dunia pada hari yang sama. Ketentuan ini didasarkan pada gagasan bahwa kesatuan waktu ibadah mencerminkan kesatuan umat, baik secara teologis maupun simbolik.

Selanjutnya, kongres menetapkan syarat visibilitas hilal (*imkanur rukyat*) sebagai dasar ilmiah untuk memulai bulan baru. Menurut kriteria ini, awal bulan Hijriah dimulai apabila di salah satu wilayah di muka bumi, sebelum pukul 00.00 Waktu Universal (UTC/GMT), telah terpenuhi dua kondisi utama, yaitu: pertama, ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam mencapai minimal lima derajat; dan kedua, jarak sudut atau elongasi antara bulan dan matahari minimal delapan derajat.

Selain itu, kongres juga menetapkan syarat tambahan (koreksi) untuk mengantisipasi kondisi di mana kriteria visibilitas baru terpenuhi setelah pukul 00.00 UTC. Dalam kasus seperti ini, awal bulan tetap dapat dimulai pada hari yang sama apabila dua syarat kumulatif terpenuhi, yaitu peristiwa ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum waktu fajar di Selandia Baru dan kriteria imkanur rukyat telah tercapai di wilayah daratan benua Amerika. Dengan kombinasi prinsip teologis dan pendekatan astronomis tersebut, resolusi Kongres Istanbul berupaya membangun sistem kalender Hijriah yang bersifat ilmiah, terukur, dan berlaku universal bagi seluruh umat Islam di dunia (Anwar, 2016).

c. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Selain menetapkan kriteria teknis, Kongres Kalender Islam Global 2016 juga menghasilkan sejumlah resolusi dan rekomendasi strategis untuk mendorong implementasi kalender Hijriah global secara efektif. Salah satu rekomendasi utama adalah agar Kepresidenan Urusan Agama Turki (Diyanet), selaku penyelenggara, berkoordinasi dengan Kepresidenan Turki guna secara resmi mengajukan draf kalender

hasil kongres kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Langkah ini dimaksudkan untuk memperoleh pengesahan formal dan mendorong adopsi kalender tersebut di tingkat negara-negara anggota, sehingga memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat dalam lingkup dunia Islam (Başkanlığı, 2018).

Kongres juga mendesak pembentukan berbagai komite kerja di tingkat global. Di antaranya adalah komite ilmiah yang bertugas menyusun dan mempublikasikan kalender Hijriah global untuk sepuluh tahun ke depan, serta komite pemantauan hilal internasional yang berperan dalam mengawasi dan memverifikasi data observasi bulan sabit dari berbagai belahan dunia. Komite-komite ini diharapkan menjadi pilar teknis yang menjaga konsistensi dan akurasi kalender global secara berkelanjutan (Başkanlığı, 2018).

Selain itu, kongres menyerukan secara khusus kepada komunitas Muslim minoritas di kawasan Eropa, Amerika, dan wilayah diaspora lainnya untuk mengadopsi kalender ini. Seruan tersebut didasari pada pertimbangan praktis guna menyatukan pelaksanaan ibadah puasa dan perayaan hari raya mereka yang selama ini sering berbeda-beda

akibat perbedaan metode penentuan awal bulan. Dengan demikian, resolusi ini tidak hanya bersifat ilmiah dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam memperkuat solidaritas dan keseragaman waktu keagamaan di kalangan umat Islam di seluruh dunia.

2. Pembahasan

a. Analisis Kongres sebagai Praktik Diplomasi Ilmiah

Kongres Istanbul 2016 merupakan contoh konkret dari praktik diplomasi ilmiah tingkat tinggi, di mana Turki secara strategis memanfaatkan sains untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Melalui penerapan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh *The Royal Society*, berbagai dimensi diplomasi ilmiah—yakni *Science in Diplomacy*, *Diplomacy for Science*, dan *Science for Diplomacy*—dapat diidentifikasi secara sistematis dalam dinamika kongres tersebut (Arafat et al., 2025).

Pada dimensi *Science in Diplomacy*, Turki memanfaatkan perhitungan astronomi (*hisab*) dan kriteria visibilitas hilal (tinggi minimal lima derajat dan elongasi minimal delapan derajat) sebagai dasar objektif dalam perumusan resolusi. Langkah ini menggeser perdebatan yang sebelumnya

bersifat fiqh murni menuju ranah ilmiah yang dapat diverifikasi, sekaligus memberikan legitimasi rasional dan modern terhadap usulan kalender global (Zainuddin et al., 2024). Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana data ilmiah digunakan untuk mendukung proses politik-keagamaan yang kompleks, menjadikan sains sebagai alat legitimasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Sementara itu, pada dimensi *Diplomacy for Science* (Buyuktanir Karacan, 2021), Diyanet berperan aktif sebagai fasilitator kolaborasi internasional dengan menyelenggarakan kongres yang mempertemukan ahli falak, fuqaha, dan perwakilan lembaga keagamaan dari puluhan negara. Melalui forum ini, terbentuk jaringan kerja sama lintas disiplin yang memperkuat sinergi antara tradisi intelektual Islam dan metodologi ilmiah modern. Hasilnya adalah terbentuknya komite ilmiah yang bertugas menyusun kalender Hijriah global dan menyatukan berbagai pendekatan astronomi dari negara-negara peserta.

Adapun dimensi *Science for Diplomacy* menjadi aspek yang paling strategis. Turki memanfaatkan isu kalender Hijriah—sebuah persoalan lama umat Islam—sebagai sarana

untuk membangun solidaritas global sekaligus memperkuat citra kepemimpinan keagamaannya (Yenokyan, 2023). Dengan memosisikan diri sebagai fasilitator solusi peradaban, Turki berupaya memperkuat *soft power*-nya di dunia Islam dan menegaskan peranannya sebagai pusat otoritas baru yang modern dan inklusif. Pendekatan ini secara halus juga menantang dominasi keagamaan Arab Saudi yang selama ini memegang otoritas kalender Ummul Qura, sehingga persaingan geopolitik antara dua kutub otoritas Islam tersebut bergeser dari ranah politik keras ke arena wacana ilmiah dan simbolik.

Oleh sebab itu, maka diplomasi ilmiah yang dipraktikkan dalam Kongres Istanbul tidak sekadar membangun jembatan antarnegara, tetapi juga menciptakan arena persaingan simbolik di mana legitimasi keagamaan dan ilmiah saling berinteraksi. Melalui strategi ini, Turki berhasil menampilkan dirinya sebagai kekuatan yang menggabungkan rasionalitas ilmiah dan visi keagamaan progresif untuk mengonsolidasikan pengaruhnya di dunia Islam kontemporer.

b. Dimensi Administrasi Publik: Diyanet sebagai Aktor Kebijakan Transnasional

Dari perspektif administrasi publik, Diyanet dapat dipahami sebagai seorang “wirausahawan kebijakan” (*policy entrepreneur*) di tingkat transnasional. Lembaga ini berhasil mengenali adanya kegagalan koordinasi global dalam penentuan kalender Hijriah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dengan menginisiasi Kongres Istanbul 2016, Diyanet mengambil peran aktif untuk menawarkan solusi kolektif yang berfungsi sebagai barang publik (*public good*) bagi seluruh umat Islam di dunia. Langkah ini sekaligus memperlihatkan kapasitas institusional Turki dalam mengisi kekosongan tata kelola internasional di bidang keagamaan yang sebelumnya tidak mampu diselesaikan oleh lembaga multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Öztürk & Sözeri, 2018).

Salah satu aspek paling penting dari pendekatan Diyanet adalah inovasi prosedural melalui mekanisme voting dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan metode ini menggantikan model deliberatif tradisional yang sering kali menemui jalan buntu karena

perbedaan teologis dan pandangan fikih yang mendalam. Dengan voting, proses kongres menjadi lebih efisien, berorientasi pada hasil, dan menghasilkan keputusan konkret berupa adopsi Kalender Islam Global (KIG) Turki 2016. Inovasi ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip manajemen publik modern yang menekankan efektivitas dan hasil terukur dalam tata kelola kebijakan.

Namun demikian, langkah tersebut juga menyingkap sisi lemahnya. Dalam teori administrasi publik, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh efisiensi prosedural atau rasionalitas teknokratis, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial dan politik dari para pemangku kepentingan. Mekanisme voting yang menegaskan konsensus penuh berpotensi menciptakan resistensi, terutama dari aktor-aktor besar yang merasa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan mayoritarian tanpa dukungan luas dapat menghasilkan kebijakan yang sah secara formal, tetapi sulit diterapkan secara praktis.

Kondisi ini terbukti dalam konteks pascakongres, di mana otoritas keagamaan Arab Saudi menolak mengadopsi hasil

resolusi tersebut, sementara di Indonesia muncul perbedaan respons antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Fenomena ini menunjukkan keterbatasan model tata kelola transnasional yang bersifat top-down ketika dihadapkan pada realitas politik dan keagamaan yang polisentris. Dengan demikian, meskipun Turki melalui Diyanet berhasil memperkenalkan model kebijakan yang inovatif dan efisien, tantangan implementasi yang dihadapi menggarisbawahi perlunya strategi tata kelola global yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap dinamika keragaman otoritas keagamaan di dunia Islam.

c. **Dinamika Konsensus dan Resistensi: Studi Kasus Indonesia**

Dinamika di Indonesia pasca-Kongres Istanbul 2016 menjadi cerminan kecil dari tantangan implementasi kalender Hijriah global di tingkat dunia. Respons yang terpolarisasi antara dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menggambarkan benturan paradigma yang mendasari perdebatan kalender Islam. Masing-masing organisasi tidak hanya berbeda dalam aspek teknis perhitungan, tetapi juga dalam kerangka epistemologis dan teologis yang melandasi

pandangan mereka tentang otoritas keagamaan dan ruang lingkup syariah (Putri et al., 2025).

Bagi Muhammadiyah, hasil Kongres Istanbul dianggap sebagai kemajuan penting dalam unifikasi umat Islam global. Organisasi ini menyambut resolusi Kalender Islam Global (KIG) Turki 2016 dengan antusias, karena sejalan dengan tradisi intelektualnya yang berbasis hisab, rasionalitas ilmiah, dan visi Islam berkemajuan (Arafat & Budiwati, 2025).

Muhammadiyah menilai KIG sebagai solusi ilmiah dan syar'ī yang mampu menjawab fragmentasi waktu ibadah di dunia Islam modern. Komitmen ini bahkan diwujudkan melalui keputusan resmi untuk mengimplementasikan KIG dengan nama KHGT secara penuh mulai 1 Muharram 1447 H (26 Juni 2025), menjadikannya pelopor penerapan sistem kalender unifikatif di tingkat nasional.

Sebaliknya, Nahdlatul Ulama menolak hasil kongres tersebut karena berpegang teguh pada paradigma fiqh tradisional. NU menempatkan rukyat sebagai metode utama penentuan awal bulan, sementara hisab hanya berfungsi sebagai pendukung. Selain itu, NU tetap berpegang

pada prinsip *ikhtilaf al-mathali'* dalam kerangka wilayatul hukmi, yang menegaskan bahwa otoritas penetapan bulan baru berada pada tingkat nasional atau regional, bukan global. Dari sisi teologis, NU berargumen bahwa kewajiban ibadah bersifat kontekstual dan terikat ruang serta waktu lokal, sehingga penyatuan kalender global dianggap tidak selaras dengan karakter syariah yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat Muslim.

Polarisasi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Muhammadiyah dan NU tidak sekadar bersifat teknis, melainkan ideologis dan paradigmatis. Muhammadiyah merepresentasikan paradigma globalis-unifikatif-saintifik yang sejalan dengan visi Turki dalam membangun solidaritas umat berbasis rasionalitas ilmiah, sedangkan NU mempertahankan paradigma lokalis-kontekstual-tradisional yang menekankan otoritas keagamaan lokal dan keberagaman praksis syariah. Ketegangan di Indonesia ini mencerminkan dilema yang lebih besar di tingkat global: bagaimana menyeimbangkan aspirasi universalisme Islam dengan realitas partikularisme negara-bangsa dan pluralitas tradisi fiqh yang telah mengakar dalam sejarah peradaban Islam.

d. Hambatan Implementasi dan Pelajaran dari Sejarah

Implementasi Kalender Islam Global Turki 2016 menghadapi berbagai hambatan politik dan institusional yang cukup signifikan di tingkat internasional. Salah satu kendala utama adalah politik kedaulatan, karena penentuan hari-hari besar keagamaan dianggap sebagai simbol otoritas dan identitas nasional.

Negara-negara Muslim, khususnya Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci, enggan menyerahkan kewenangan tersebut kepada lembaga transnasional atau mengadopsi sistem yang diinisiasi oleh kekuatan regional lain seperti Turki. Hal ini bukan semata-mata persoalan teknis keagamaan, melainkan juga persoalan legitimasi politik dan rivalitas kepemimpinan dalam dunia Islam (Ciftci & Tezcür, 2016).

Selain itu, inersia institusional di tubuh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjadi hambatan tambahan yang memperlambat proses adopsi kalender global ini. Meskipun Kongres Istanbul merekomendasikan agar hasil resolusinya diajukan kepada OKI untuk mendapatkan legitimasi dan penerapan resmi, organisasi ini dikenal memiliki proses

pengambilan keputusan yang lambat serta sering kali terhambat oleh perbedaan politik antarnegara anggotanya. Akibatnya, upaya Turki untuk menjadikan kalender ini sebagai kebijakan bersama dunia Islam menemui banyak kendala birokratis dan diplomatik.

Hambatan lain muncul dari keberadaan alternatif regional, seperti kriteria baru MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menetapkan tinggi hilal minimal tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini dianggap lebih realistis dan mudah diterima karena disesuaikan dengan kondisi geografis serta otoritas keagamaan regional Asia Tenggara. Sebaliknya, kriteria Turki yang lebih ketat—dengan tinggi hilal lima derajat dan elongasi delapan derajat—dipandang kurang fleksibel bagi penerapan di berbagai wilayah, sehingga mengurangi peluang untuk diterima secara luas.

Pelajaran penting dapat diambil dari reformasi Kalender Gregorian tahun 1582, yang meskipun secara ilmiah lebih akurat dibandingkan kalender Julian, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk diakui secara universal. Penolakan yang terjadi pada masa itu—khususnya dari

negara-negara Protestan dan Ortodoks—menunjukkan bahwa standardisasi kalender tidak hanya menyangkut akurasi ilmiah, tetapi juga bergantung pada faktor politik, otoritas keagamaan, dan legitimasi sosial. Dunia Islam kontemporer yang bersifat polisentris, tanpa adanya otoritas tunggal seperti kepausan di masa lalu, menghadapi tantangan serupa.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kalender Islam Global Turki 2016 membutuhkan strategi diplomatik jangka panjang, kepemimpinan moral yang kuat, serta proses pembiasaan sosial yang berkelanjutan sebelum dapat diterima secara universal oleh seluruh dunia Islam.

KESIMPULAN

International Hijri Calendar Unity Congress 2016 di Istanbul merupakan sebuah momen penting dalam sejarah panjang upaya unifikasi kalender Islam. Analisis dari perspektif diplomasi ilmiah dan administrasi publik menunjukkan bahwa kongres ini lebih dari sekadar pertemuan teknis; ia adalah sebuah praktik diplomasi yang canggih dan intervensi kebijakan transnasional yang inovatif. Keberhasilan utamanya terletak pada kemampuannya untuk memecah kebuntuan deliberasi selama puluhan tahun dengan menghasilkan sebuah proposal kalender global yang

konkret, berbasis ilmiah, dan didukung oleh mayoritas peserta melalui mekanisme administratif yang tegas.

Namun, kongres ini harus dinilai sebagai sebuah keberhasilan parsial. Di satu sisi, ia berhasil menggeser wacana global ke arah solusi yang lebih sistematis dan memberikan sebuah model yang diadopsi oleh gerakan modernis Islam yang berpengaruh seperti Muhammadiyah. Ini adalah sebuah pencapaian yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, tujuan akhir untuk mencapai unifikasi kalender global yang diterima secara universal masih jauh dari kenyataan. Resistensi yang kuat, yang berakar pada politik kedaulatan negara dan perbedaan paradigma fiqh yang mendalam, menunjukkan bahwa solusi teknokratis-saintifik memiliki batas yang jelas ketika dihadapkan pada isu-isu yang sarat dengan nilai, tradisi, dan politik identitas.

Implikasinya, masa depan penyatuan kalender Islam kemungkinan besar tidak akan terwujud melalui satu solusi tunggal yang diterima secara serentak dalam waktu dekat. Jalan ke depan yang lebih realistis akan melibatkan negosiasi yang berkelanjutan, pencarian kompromi di tingkat regional seperti penguatan forum MABIMS, serta yang tidak kalah penting, pelaksanaan program edukasi dan literasi ilmu falak yang masif dan sistematis untuk masyarakat umum. Dalam proses ini, peran aktif masyarakat sipil dan media massa

dalam membentuk opini publik yang lebih kondusif terhadap semangat persatuan akan menjadi faktor yang sangat krusial..

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2016). Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih. *Jurnal Tarjih*, 13(2), 99–123.
- Arafat, M., Azhari, S., Budiwati, A. & Yusril Nurilham. (2025). Turkish Religious Diplomacy An Analysis of Efforts to Achieve Socio-Political Consensus Through the 2016 Global Islamic Calendar Congress. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 8027–8040. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7047>
- Arafat, M. & Budiwati, A. (2025). Syamsul Anwar's Vision: Establishing a Unified Global Islamic Calendar. *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, 7(1), 67–83. <https://doi.org/10.20414/afaq.v7i1.11438>
- Başkanlığı, D. İ. (2018). *Mu'tamar Tawhīd al-Taqwīm al-Hijrī al-Duwalī* (F. Kurt (ed.)). Diyanet İşleri Başkanlığı.
- Baxter, Pamela & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4).
- Buyuktanir Karacan, D. (2021). Science diplomacy as a foreign policy tool for Turkey and the ramifications of collaboration with the EU. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00722-z>
- Çiçek, H. (2024). Neo-Ottoman Soft Power: AKP's Strategic Use of Turkish-Islamic Organizations in the German-Speaking Diaspora. *Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik*, 17(2), 107–118. <https://doi.org/10.1007/s12399-024-00988-6>
- Ciftci, S. & Tezcür, G. M. (2016). Soft Power, Religion, and Anti-Americanism in the Middle East. *Foreign Policy Analysis*, 12(3), 374–394. <https://www.jstor.org/stable/26168110>
- Fitriyanti, V., Haries, A. & Syakur, A. (2024). The Triple Helix Theory as a Solution for the Unification of the Hijri Calendar in Indonesia. *Jurnal Al-Fikrah*, 13(2), 202–224. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v13i2.871>
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (William Rehg (ed.)). MA: The MIT Press.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S. & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul

- Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(105(2)), 1–14. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.210>
- Mohd Nawawi, M. S. A., Faid, M. S., Saadon, M. H. M., Wahab, R. A. & Ahmad, N. (2024). Hijri Month Determination in Southeast Asia: An Illustration Between Religion, Science, and Cultural Background. *Heliyon*, 10(20), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38668>
- Nisa', I. N. F. & Ulinuha, M. (2021). Ittihad and Ikhtilaf Al Mathla' (Discourse and Its Implementation). *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 3(2), 19–42. <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2021.3.2.8120>
- Osborne, David T Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Öztürk, A. E. & Sözeri, S. (2018). Diyanet as a Turkish Foreign Policy Tool: Evidence from the Netherlands and Bulgaria. *Politics and Religion*, 11(3), 624–648. <https://doi.org/10.1017/S175504831700075X>
- Putri, W. T., Zahroma, K., Hamid, A. & Lubabah, N. (2025). Between Text and Telescope: Fiqh-Science Dialectic in Determination of the Indonesian Hijri Calendar. *JABSAH: Journal of Islamic Law*, 1(1), 28–40.
- Scholars, I. U. of M. (2016a). *The Conference for the unification of the International Hijri calendar*. International Union of Muslim Scholars. <https://www.iumsonline.org/en/ContentDetails.aspx?ID=5928>
- Scholars, I. U. of M. (2016b). *The International Hijri Calendar Conference in Istanbul, Turkey*. IUMS Official Website. <https://www.iumsonline.org/en/ContentDetails.aspx?ID=5928&>
- Yenokyan, A. V. (2023). The Importance of Soft Power in Türkiye's Foreign Policy in 2002-2022. *Vestnik RUDN. International Relations*, 23(4), 609–619. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2023-23-4-609-619>
- Zainuddin, I., Musa, Z. M. & Sembilan, N. (2024). The transformation of imkan al-ru'yah (crescent visibility) criteria in malaysia: challenges and solutions. *SALAM Digest*, 2(1), 160–170.